

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, Pada awalnya Jepang ingin merebut kekuasaan wilayah Asia Tenggara dari bangsa Eropa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang melakukan serangan ke wilayah koloni bangsa Eropa di Asia Tenggara. Ketika memasuki wilayah Hindia Belanda (Indonesia) yang dikuasai oleh Belanda, Pasukan Jepang melakukan serangan secara serentak agar pihak musuh tidak dapat mempersiapkan pasukannya. Pasukan Jepang berusaha menguasai Hindia Belanda (Indonesia) dan memulai Politik Imperialismenya adalah selain untuk menyebarkan kebudayaan Jepang, mereka juga ingin mendapatkan kekuasaan atas sumber daya seperti tambang minyak, batubara, serta perkebunan atau ladang pertanian di Hindia Belanda (Indonesia) demi menunjang keberlangsungan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya.

Selain itu, Sistem Politik Imperialisme Jepang yang diterapkan di Indonesia juga berpengaruh di berbagai bidang, yaitu; Birokrasi, Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan, Politik, serta Militer. Dari bidang-bidang tersebut, Pemerintah Militer Jepang membentuk berbagai sistem serta kebijakan pada masing-masing bidang. Dari sistem dan kebijakan yang dibentuk, ada di antaranya yang berdampak positif terhadap masyarakat dan masih berguna hingga saat ini seperti; pelatihan militer untuk membela tanah air dan penerapan sistem *Tonarigumi*. Serta ada juga di antaranya yang berdampak buruk terhadap masyarakat, seperti *Romusha*.

Dalam hal ini, Politik Imperialisme Jepang di Indonesia berdampak pada kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sistem ini mampu menjangkau wilayah Indonesia secara menyeluruh, dari daerah terpencil sampai ke perkotaan. Hal tersebut berdampak positif karena mampu mempermudah pemerintah pusat untuk melakukan pendataan penduduk

secara menyeluruh dengan lebih mudah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Dan juga terdapat program dari pemerintah untuk wajib belajar selama 12 tahun. Berdasarkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Program tersebut mirip seperti kebijakan Jepang yang pernah diperlakukan selama pendudukannya di Indonesia dalam bidang pendidikan. Namun di sisi lain, Politik Imperialisme Jepang juga membawa dampak negatif terhadap rakyat Indonesia karena banyak membuat kebijakan untuk wilayah pendudukannya yang tidak berperikemanusiaan seperti *Romusha*. *Romusha* adalah suatu propaganda yang dibentuk Jepang untuk mendapatkan banyak tenaga kerja. Orang-orang yang mendaftar sebagai *Romusha* kebanyakan para petani dari Pulau Jawa, lalu dikirim keluar pulau. Namun *Romusha* dianggap sangat kejam karena orang-orang yang dipaksa untuk bekerja dibiarkan dalam keadaan kelelahan, kelaparan, kurus, miskin, sakit, hingga meninggal.

Pada awal kedatangan Pasukan Jepang, tokoh-tokoh nasional Indonesia menyambut mereka dengan baik. Karena ketika datang ke Indonesia, Pasukan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Oleh karena itu, tokoh-tokoh nasionalis setuju untuk membantu Pasukan Jepang dalam perang. Tokoh-tokoh nasionalis terkenal menyuarakan propaganda-propaganda yang dibentuk Pasukan Jepang untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dari propaganda tersebut, tokoh-tokoh nasional menyadari bahwa propaganda yang dibentuk Pasukan Jepang hanya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, tokoh-tokoh nasional memanfaatkan celah yang diberikan Jepang di dalam sistem pemerintahannya untuk merencanakan kemerdekaan atas penjajahan mereka.

Sementara, setelah Jepang mengalami kekalahan dan menyerah dari sekutu, hal tersebut menjadi suatu keuntungan besar bagi Indonesia. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh tokoh pergerakan nasional dalam memanfaatkan peran Jepang dan sistem politik di Indonesia membuahkan hasil yang baik.